



UNIVERSITAS TERBUKA
MAKING HIGHER EDUCATION OPEN TO ALL

FISIP

ISBN 978-979-011-690-0

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL DEMOKRASI DAN MASYARAKAT MADANI

TEMA:
**Peran Negara dan Masyarakat Dalam
Pembangunan Demokrasi dan
Masyarakat Madani di Indonesia**

UNIVERSITAS TERBUKA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2011

Hak Cipta © pada Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan – 15418
Banten – Indonesia

Telp. : (021) 7490941 (*hunting*)

Fax. : (021) 7400147

Homepage : www.ut.ac.id

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit

Edisi Kesatu
Cetakan pertama, Februari 2012

Tim Editor

Ketua : *Anto Hidayat*

Anggota : 1. *Daryono*
2. *Liestyodono B. Irianto*
3. *Chanif Nurholis*
4. *Tri Darmayanti*
5. *Sri Sedyaningsih*
6. *Irsanti Widuri Asih*
7. *Yudith A. Frans*

Tata Letak : *Sofyanusuri*

300

SEM

SEMINAR NASIONAL FISIP - UT 2011 (PROCEEDING)
BNBB/

Anto Hidayat, dkk. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.

669 hal: 21 cm.

ISBN: 978-979-011- 690-0

I. Judul

II. Anto Hidayat, dkk.

KATA PENGANTAR

Selama lebih dari satu dasawarsa, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut yang ditandai oleh munculnya beragam konflik dan resistensi kelompok yang mengancam kehidupan berdemokrasi. Di sisi lain, proses demokrasi itu sendiri telah memberikan ruang bagi tumbuhnya masyarakat madani sebagai instrumen penting masyarakat demokratis. Proses tersebut membutuhkan pembelajaran, diskursus, dan inovasi yang tidak akan pernah berhenti guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Sebagai sumbangan terhadap diskursus dan inovasi pembangunan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk "Demokrasi dan Masyarakat Madani". Seminar Nasional FISIP-UT 2011 mengangkat tema: "Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia". Selain mengundang pembicara kunci dan nara sumber, Seminar Nasional dihadiri oleh para pemakalah yang berasal dari berbagai institusi, antara lain Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Pelita Harapan, Kementerian Keuangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, ASM Bina Sarana Informatika, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Sakti Surabaya, Universitas Udayana, dan Universitas Terbuka.

Buku ini merupakan himpunan makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional FISIP-UT 7 Juli 2011. Para pemakalah mengkaji berbagai permasalahan terkait dengan tema di atas dari berbagai perspektif yang terbagi ke dalam subtema berikut: (1) teorisasi demokrasi, negara bangsa dan masyarakat madani; (2) membangun masyarakat madani dan demokrasi; (3) pengembangan kapasitas infrastruktur demokrasi; dan (4) institusi dan kearifan lokal dalam tatanan demokrasi.

Akhir kata, berbagai kajian yang terhimpun dalam buku ini diharapkan menjadi arena diseminasi dan pembelajaran bagi para akademisi, politikus, aparatus birokrasi, dan masyarakat umum.

Ketua Panitia Semnas FISIP-UT 2011

Anto Hidayat, S.IP, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Laporan Dekan FISIP-UT	viii
Sambutan Rektor UT	xi
 Tema: Teorisasi Demokrasi, Negara Bangsa dan Masyarakat Madani	
Teorisasi Demokrasi, Negara Bangsa, dan Masyarakat Madani Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Oleh: Anugrah Fazariantanto	1
Antara Demokrasi dan Determinan Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Arif Budi Rahman	17
<i>Building National Cohesiveness & Auto-Therapeutic Governance Through Good Societal Governance</i> Oleh : Dadan Sidqul Anwar	30
Negara Kebangsaan dari Perspektif Komunikasi Oleh : Emrus Sihombing	63
Peluang Kesejahteraan di Negara Demokrasi oleh : Enceng, Meita Istianda	79
Perdebatan Teoritis Mengenai <i>Civil Society</i> di Negara-Negara Asia Oleh : Endang Sriningsih	98
Masyarakat Madani dan Ideologi dalam Penerjemahan: Sebuah Perspektif Interdisipliner Oleh : Karnedi	119
Masyarakat Madani: Tawaran Konseptual Untuk Indonesia Oleh : Samodra Wibawa, Pradhikna Yunik Nurhayati	130
Monarkhi Konstitusional: Telaah Filsafati Oleh : Samodra Wibawa	146

Tema: Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi

Pentingnya Pendidikan Multikultural untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Oleh : Abednego Tri Gumono	156
Penerjemah Sebagai Agen Perubahan: Mencermati Keterlibatan Penerjemah dalam Pengarusutamaan Perlindungan Hak Anak di Nangroe Aceh Darussalam Oleh : Agus Riyanto	170
Demokrasi Bukan Milik Pemimpin Oleh : Andriyansah	179
Membangun Demokrasi dengan Payung Etika Oleh : Arenawati	197
<i>Fairplay</i> Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi Oleh : Ayi Karyana	210
Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi Oleh : Ary Purwantiningsih dan Rhini Fatmasari	230
Antara Demokrasi dan Investasi Dibalik Gugatan Terhadap Status Keistimewaan Yogyakarta Oleh : Budi Wibawanto	239
<i>Civil Society</i> di Tengah Perubahan Politik Indonesia Oleh : Ignatius Ismanto	254
Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi: Suatu Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani Di Indonesia Oleh : Kusnadi	272
✓ Kematangan Sosial dan Masyarakat Madani Oleh : Lilik Aslichati	290
Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi Dalam Bingkai Konstitusionalisme Oleh : Manunggal K. Wardaya ...	300
Peningkatan Kualitas Demokrasi dalam Membumikan <i>Civil Society</i> di Indonesia: Pengalaman Satu Dasawarsa Oleh Ronny Basista	315
Peran dan Tantangan <i>Civil Society</i> dalam Reformasi Bidang Keamanan di Indonesia: Studi Atas Proses Rancangan	

Undang-Undang Keamanan Nasional Oleh : Sarah Nuraini Siregar	323
<i>Community Broadcasting</i> Sebagai Upaya Menuju <i>Knowledge Based Society</i> Oleh : Siti Samsiyah	336
Etika Komunikasi Sebagai Tonggak Pembelajaran Demokrasi Oleh : Sri Sedyaningsih dan Ace Sriati Rahman	345
Pentingnya Informasi pada Masyarakat Madani Oleh : Sri Suhardini	358
Membangun Masyarakat Madani Melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Oleh : Suparman HL	368
Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi Oleh : Suryarama	382
Prospek Demokratisasi Indonesia Antara <i>Civil Society</i> dan <i>Political Society</i> Oleh : Victor Silaen	403
Pendidikan Politik: Membangun Demokrasi, Negara, Bangsa, dan Masyarakat Madani dalam Pandangan Hatta Oleh : Zulfikri Suleman	428
Tema: Pengembangan Kapasitas Infrastruktur Demokrasi	
Sistem Pelayanan Birokrasi yang Praktis Tidak Birokratis Oleh : Chafid Diyanto, Ali Rokhman	442
<i>E-Government</i> sebagai Sarana Demokratisasi dan Akuntabilitas dalam Pemerintah Lokal Oleh : Chasidin, Ali Rokhman	451
Media Sosial Dan Politik: Sarana <i>E-Democracy</i> atau Sekadar Pepesan Kosong? Oleh : Irsanti Widuri Asih	471
Resiko Konflik Eksekutif - Legislatif Di Era Otonomi Daerah Terhadap Masyarakat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Oleh : Iqbal M. Mujtahid	485
Fungsi Jejaring Pertemanan Sosial <i>Facebook</i> Sebagai Sarana Membentuk Masyarakat Madani dan Demokrasi Oleh : Rosalita Agustini	497

Peran Militer dalam Perjalanan Demokrasi di Indonesia Oleh: Suryo Wibisono, Swastha Darma	504
Membangun Masyarakat Madani Menuju Masyarakat Informasi Indonesia Dampak Sosial, Konsekuensi dan Kemungkinannya Oleh : Yasir Riady	518
Tema: Institusi dan Kearifan Lokal Dalam Tatanan Demokrasi	
Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keadilan dan Keterbukaan PNS dalam Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat) Oleh : Aldri Frinaldi, Muhamad Ali Embi	534
Demokrasi Otonomi Daerah: Kolaborasi Pemerintahan Pusat dan Kearifan Lokal Oleh : Fatia Fatimah, Purwaningdyah.....	564
Dua Ratus Tahun Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Nilai Demokrasi oleh Bangsa Indonesia Oleh : Hanif Nurcholis	571
<i>Civil Society</i> Dan Penanggulang Konflik Sosial Oleh: Heri Wahyudi	592
Merajut Modal Sosial Membangun Kebersamaan Menuju Masyarakat Madani, Demokratis, dan Berkeadilan Oleh: Pardamean Daulay	609
Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Demokrasi dan Pembangunan Indonesia Oleh : Putri Amal Wijayanti, Ali Rokhman	626
Desentralisasi, Modal Sosial dan Kelembagaan Lokal (Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Cipta Asosiasi Pengrajin Cor Patung Kuningan Bejjong Kabupaten Mojokerto) Oleh : Tedi Erviantono	642
Signifikansi Masyarakat Multikultural Bagi Pengembangan Demokratisasi Oleh : Yulia Budiwati	655

KEMATANGAN SOSIAL DAN MASYARAKAT MADANI**Lilik Aslichati**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
lilik@ut.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial dengan fondasi dasarnya adalah keadilan dan kesetaraan. Bentuk masyarakat semacam ini diyakini mampu menumbuhkan masyarakat bangsa yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Karakteristik masyarakat madani adalah adanya: (a) demokratisasi, (b) partisipasi sosial, dan (c) supremasi hukum dalam masyarakat. Artinya, masyarakat atau warganegara harus kritis dan rasional dalam menyikapi penyelenggaraan pemerintahan, mampu berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek pembangunan, dan ada pengaturan penyelenggaraan Negara yang peraturannya ditegakkan secara kuat dan tegas serta adil. Masyarakat madani akan terbentuk jika masyarakatnya secara mayoritas sudah memiliki kematangan sosial. Masyarakat yang matang adalah masyarakat yang mampu berpikir, bertindak, dan berperilaku sebagaimana layaknya orang dewasa. Kematangan sosial bukan sesuatu yang instan, melainkan terbentuk melalui suatu proses yang panjang. Agar terbentuk masyarakat madani yang benar-benar mampu mendukung naiknya martabat bangsa Indonesia, perlu ditumbuhkan kematangan sosial yang terencana, terprogram, dan sistematis sejak dini.

Kata kunci : *kematangan sosial, masyarakat madani*

Perjalanan demokrasi di Indonesia terus dan sedang mencari bentuk terbaiknya. Selama pemerintahan orde baru kita merasakan demokrasi justru dijalankan dengan cara-cara yang anti demokrasi. Karakteristik adanya persaingan yang sehat dalam masa orde baru, tidak kita jumpai. Stabilitas dan keamanan atau istilah populernya ketika itu, aman terkendali, menjadi mantra untuk mengharamkan

kontestasi politik. Jargon yang ditanamkan adalah *politic no, economy yes*. Pada era reformasi dengan model demokrasi langsung, memberikan angin segar munculnya persaingan politik. Walaupun masih banyak fenomena kecurangan dalam setiap kontestasi, tetapi keran persaingan sudah terbuka. Terbukanya kontestasi ini memerlukan kematangan sosial, artinya secara emosional masyarakat harus dewasa. Masyarakat yang memiliki kematangan sosial akan mampu berpikir objektif, berpikir positif, mampu mengendalikan dan menyalurkan emosi, bertanggung jawab, serta mampu membina hubungan interpersonal yang harmonis dan konsisten dalam waktu yang relatif panjang. Masyarakat semacam inilah yang akan menumbuhkan masyarakat madani yang kuat, yang mampu menjaga agar keran kontestasi sebagai bagian dari perjalanan demokrasi, tidak kebablasan.

MASYARAKAT MADANI

Wacana publik tentang reformasi dan pengembangan budaya politik Indonesia umumnya bermuara pada gagasan tentang pembentukan masyarakat madani Indonesia. Akan tetapi harus diakui masih belum terdapat pemahaman yang sama di kalangan para ahli dan masyarakat Indonesia umumnya tentang apa sesungguhnya masyarakat madani tersebut. Sebagian besar ahli, bertitik tolak dari kerangka dan pengalaman Eropa Timur dan Amerika Latin, masih memandang "masyarakat madani" dalam posisi oposisional vis-a-vis negara, dan bahkan sebagai alternatif bagi Negara.

Pengertian masyarakat madani sudah diperbincangkan sejak tahun 1990-an di kalangan kaum intelektual. Istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari istilah *civil society*, yang diartikan beragam, seperti "masyarakat sipil", "masyarakat kewarganegaraan" dan "masyarakat warga". Terjemahan "masyarakat sipil" digunakan sebagai lawan kata militer; terjemahan "masyarakat kewarganegaraan" pernah digunakan oleh Asosiasi Politik Indonesia (API) dalam seminar nasional di Kupang pada tahun 1995. Tetapi pada perkembangannya istilah-istilah itu kalah populer dengan istilah masyarakat madani.

Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan *"the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market"*, atau wilayah kegiatan yang dilakukan di luar wilayah pemerintah dan pasar. Ciri-ciri masyarakat madani adalah:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya loyalitas (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif (Bahmueller, 1997).

Dari beberapa ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fondasinya.

Meskipun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, tetapi terbentuk melalui suatu proses panjang dan perjuangan yang terus-menerus. Masyarakat madani tidak akan dapat melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol bagi negara untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajibannya kecuali ada

demokratisasi di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suharto (2002) demokratisasi pada masyarakat madani pada dasarnya ada dua, yaitu *democratic governance* (pemerintahan yang dipilih dan berkuasa secara demokratis), dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan sipil, tanggungjawab sipil, dan ketahanan sipil). Menurut Chandoke (1995) demokratisasi merupakan karakter utama masyarakat madani, karena mekanisme demokrasilah yang mampu mengoreksi kecenderungan menyumbat masyarakat sipil oleh Negara. Untuk menumbuhkan demokratisasi pada masyarakat madani, maka perlu ditumbuhkan partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa. Partisipasi yang bersih akan tumbuh bilamana terdapat iklim yang kondusif bagi terjaganya otonomi individu. Antitesa dari sebuah masyarakat madani adalah tirani yang memasung secara kultural maupun struktural kehidupan bangsa dengan menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumentasi sosialnya. Akibatnya masyarakat pada umumnya tidak memiliki daya yang berarti untuk memulai sebuah perubahan, dan tidak ada tempat yang cukup luang untuk mengekspresikan partisipasinya dalam proses pembangunan. Tirani seperti inilah, berdasarkan catatan sejarah, secara permanen dihadapi oleh gerakan masyarakat sipil. Mereka senantiasa berusaha keras mempertahankan status quo tanpa mempedulikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pada masa orde baru cara-cara mobilisasi sosial lebih banyak dipakai ketimbang partisipasi sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian yang hilang pada hampir seluruh proses pembangunan yang terjadi. Demokrasi tanpa adanya partisipasi social akan menjadi demokrasi pura-pura atau demokrasi semu. Hal lain yang tidak boleh dihindari adalah adanya supremasi hukum, karena hanya dengan kuatnya penegakan hukum sajalah keadilan dapat dijamin. Dengan demikian keadilan harus ditegakkan secara netral, dalam arti tidak boleh ada pengecualian dalam penegakan hukum. Apabila diurai, ketiga kriteria tersebut (demokratisasi, partisipasi social, dan penegakan hukum) menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:

- i. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keuarga, dan keiompok dalam masyarakat.

2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

Ketujuh prasarat masyarakat madani tersebut akan tercapai jika para anggota masyarakat memiliki kematangan sosial (*social maturity*), karena masyarakat yang memiliki kematangan sosial akan mampu berpikir objektif, positif, mampu mengendalikan dan menyalurkan emosi, bertanggung jawab, dan mampu membina hubungan interpersonal yang harmonis dan konsisten dalam waktu yang relatif panjang. Anggota masyarakat yang matang lah yang mampu membuat masyarakat madani kuat.

KEMATANGAN SOSIAL (*SOCIAL MATURITY*)

Teori kematangan sosial atau kadang juga disebut dengan kematangan emosional, pertama kali dicetuskan oleh Robert Kegan (1982) seorang psikolog Harvard melalui bukunya "The Evolving Self", yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Kematangan sosial berkembang secara bertahap – sebagaimana halnya dengan kematangan kognitif – dimulai dari pemahaman

sosial yang sederhana sampai dengan pemahaman sosial yang kompleks.

2. Apresiasi lingkungan sosial dan emosi manusia sesungguhnya tidak cukup akurat untuk mengukur kompleksitas lingkungan sosial, tetapi mereka tetap merupakan representasi terbaik dari apa yang dapat dilakukan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Kemampuan untuk merasakan atau memahami apresiasi lingkungan sosial yang lebih kompleks akan berkembang seiring kematangan sosial. Jadi mula-mula seseorang hanya mampu memahami apresiasi lingkungan hanya dari sisi subjektif, kemudian secara bertahap menjadi mampu memahaminya dari perspektif yang berbeda-beda.
4. Tahapan baru dari perkembangan sosial/emosional seseorang muncul ketika akhirnya mereka mampu melihat dirinya dalam perspektif sosial yang lebih besar dan luas dan mampu memahami segala sesuatu secara lebih objektif.
5. Secara progresif tahapan ini semakin berkembang seiring kematangan diri, di mana subjektivitas makin berkurang dan tumbuh kemampuan menghargai orang lain dan masyarakat yang lebih luas.
6. Secara teoretik tahapan ini berakhir seiring dengan kemampuan memahami sesuatu yang objektif secara objektif. Atau dengan kata lain ketika tingkat kematangan sosialnya sudah sama dengan kematangan sosial sebagian besar warga masyarakat lingkungannya.

TAHAPAN KEMATANGAN SOSIAL

Kegan membagi tahapan perkembangan kematangan sosial dalam 5 tahap, yaitu: *incorporative*, *impulsive*, *imperial*, *interpersonal*, dan *institutional*. di mana bayi sudah mulai berlatih menggunakan reflex dan inderanya untuk mengenali bahwa di dunia ini ada hal-hal lain yang bukan dirinya.

Fase incorporative. Pada awalnya, semua bayi sepenuhnya subjektif, mereka tidak tahu sama sekali cara menginterpretasi segala sesuatu. Mereka hanya bisa mengenali wajah orang tua dan orang-orang lain yang terdekat.

Fase impulsive. Pada fase ini bayi sudah mulai berlatih menggunakan reflex dan inderanya untuk mengenali bahwa di dunia ini ada hal-hal lain yang bukan dirinya.

Fase imperial. Pada fase ini anak menjadi "raja kecil" yang menuntut semua orang memenuhi semua kebutuhannya, karena yang ada pada kesadaran dirinya hanya dia yang memiliki kebutuhan. Anak tidak paham bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan yang mungkin sama.

Fase interpersonal. Pada fase ini anak mulai memahami bahwa ada kebutuhan orang lain di luar sana yang juga harus dihormati dan dipenuhi. Anak juga sudah mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan kerjasama dengan orang-orang lain untuk saling memenuhi kebutuhannya.

Fase institusional. Pada fase ini anak sudah memiliki gagasan, prinsip, nilai, dan mampu membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai-nilai keberanian, kejujuran, empati, simpati, dan semacamnya sudah tumbuh kuat pada masa ini. Pada fase ini anak sudah mampu menempatkan dirinya diantara pergaulan keluarga, masyarakat sekitar, dan masyarakat yang lebih luas.

Jika fase-fase itu berjalan dengan mulus, maka dapat diharapkan anak akan tumbuh menjadi pribadi atau orang dewasa yang matang secara emosional atau sosial. Pribadi-pribadi semacam inilah yang mesti ditumbuhkan agar masyarakat madani yang sehat dan kuat dapat terbentuk.

Kematangan sosial bisa terkikis dan menular. Bagi kebanyakan orang, kematangan ditandai dengan kedewasaan yang diindikasikan dengan keberanian memasuki jenjang perkawinan, punya penghasilan sendiri serta lepas dari bimbingan orang tua. Namun, terutama dalam situasi menekan, kritis dan berisiko, kita sendiri kemudian dapat menyadari ataupun menyaksikan bahwa respons individu sering menunjukkan ketidakdewasaan. Seorang atasan bisa saja "mengecilkan" harga diri bawahannya sedemikian rupa, sehingga setiap individu yang menyaksikan kejadian tersebut bisa melihat bahwa sang atasan-lah yang tidak bijaksana. Seorang professional pun bisa tidak mengakui kesalahan yang dibuat, bahkan menuding

orang lain yang perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Bila dibahas lebih dalam lagi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak bijaksananya individu disebabkan karena ia belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan baik oleh lingkungan maupun oleh dirinya sendiri.

Kenyataan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kematangan tidak diturunkan, bukan bawaan sejak lahir, tetapi benar-benar dipelajari dan dilatih. Selain itu kematangan atau ketidakmatangan juga bisa terkikis dan menular. Bayangkan betapa menyedihkannya bila menyaksikan seorang yang sudah berangkat matang, kemudian merosot karena berada di lingkungan yang bobrok. Seorang ahli psikologi sosial bahkan menuliskan bahwa kematangan atau ketidakmatangan bisa merupakan ciri sekelompok orang, misalnya kelompok orang yang terlalu fanatik sehingga mempunyai keyakinan-keyakinan yang tidak objektif lagi ataupun kelompok orang yang mempunyai norma yang jelas-jelas sudah tidak diterima masyarakat tetapi tetap membenarkannya, atau sekelompok orang yang maunya selalu mendesakkan keinginannya tanpa mau tahu dengan kepentingan kelompok masyarakat lainnya. Bahkan pemimpin atau penyelenggara negara juga bisa secara tidak matang menentukan arah politiknya, sehingga mengakibatkan penderitaan jutaan rakyat.

Bagaimana cara menumbuhkan kematangan diri dan kematangan sosial? Eileen Rahman dan Sylviana Savitri, psikolog dari lembaga konsultasi pengembangan sumberdaya manusia Experd memberikan beberapa tip untuk menumbuhkembangkan kematangan, antara lain:

1. Pertajam Kesadaran

Seorang teman saya, membutuhkan waktu sangat panjang untuk meninggalkan pekerjaannya yang sangat nyaman namun tidak memancing tanggungjawab, bahkan memperlakukannya sebagai robot. Pekerjaannya demikian bertumpuk, sehingga selama lebih dari 5 tahun, ia tidak punya kesempatan menampilkan kemampuannya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika ia memberanikan dirinya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, ia merasakan banyak kekurangan dirinya, baik dalam ketrampilan teknis

dan juga hubungan interpersonal. "Saya merasa dibutakan dalam lingkungan yang nyaman. Saya merasa ketinggalan" katanya. Untung saja teman kita ini masih mempunyai kemampuan untuk menyadari kekurangan dan mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri.

Hal yang sering terjadi adalah bahwa kenyamanan lingkungan kerja dapat menyebabkan orang tidak berani keluar dari lingkungan tersebut, memelihara sikap kebal dan pengecutnya, bahkan mengembangkan imaturitasnya sampai tua. Tumpulnya kesadaran yang dipelihara sering menyebabkan ketidakmampuan individu untuk berdialog dengan hati nurani atau katahatinya, sehingga ia kehilangan kacamata objektif dan positifnya dan memang "dibutakan" dari realitas.

2. Perkuat Sifat Ksatria

Tindakan "hara-kiri" (bunuh diri demi kehormatan) memang sudah tidak banyak terjadi di Jepang, negara di mana kebiasaan itu dilakukan oleh para Samurai di jamannya. Di jaman modern ini, mungkin budaya seperti itu tampil dalam bentuk budaya "*shame and guilt*" alias malu, seperti tindakan mengundurkan diri pejabat yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang merugikan atau mencelakakan orang lain atau negara, sekedar untuk membuktikan sikap ksatrianya. Seorang "guru" mengatakan "*Maturity is humility. It is being big enough to say, 'I was wrong'. And, when right, the mature person need not experience the satisfaction of saying, 'I told you so.'*"

Berbeda dengan prestasi, individu memang tidak bisa "pamer kematangan" dengan mudah, tetapi harus membuktikannya dengan tindakan yang teruji. Sikap obyektif, positif, bertanggungjawab dan matang emosi hanya bisa ditakar dalam hati. Bila seorang pimpinan ingin bersikap bijaksana, adil dan "fair", maka ia perlu menyelesaikan pergulatan dan konflik internalnya di dalam hati dan tidak menyatakan keras-keras, "Saya mengambil keputusan yang bijaksana, loh". Kita, bangsa Indonesia, memang pintar-pintar, tinggal pe-er di depan mata adalah menjadi bangsa yang matang. (Eileen Rahman, KOMPAS, 10 Mei 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Blakeley, Roger and Suggate, Diana (1997). "Public Policy Development", dalam Robinson, David (ed).
1997. *Social Capital and Policy Development*. Wellington: Victoria University, Institute of Policy Studies.
- Bahmueller, CF (1997), *The Role of Civil society in the Promotion and Maintenance of Constitutional Liberal Democracy*, <http://civnet.org/civitas/panam/papers/bahm.htm>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2011.
- Chandoke, Neera. 1995. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Wacana
- Kegan, Robert. 1982. *The Evolving Self: Problem and Process in Human Development*. Harvard University Press
- Suharto, Edi. 2002. *Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadilan*. Orasi Ilmiah dalam Pembentukan HIMA Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) STKS Bandung, 21 Oktober 2002